

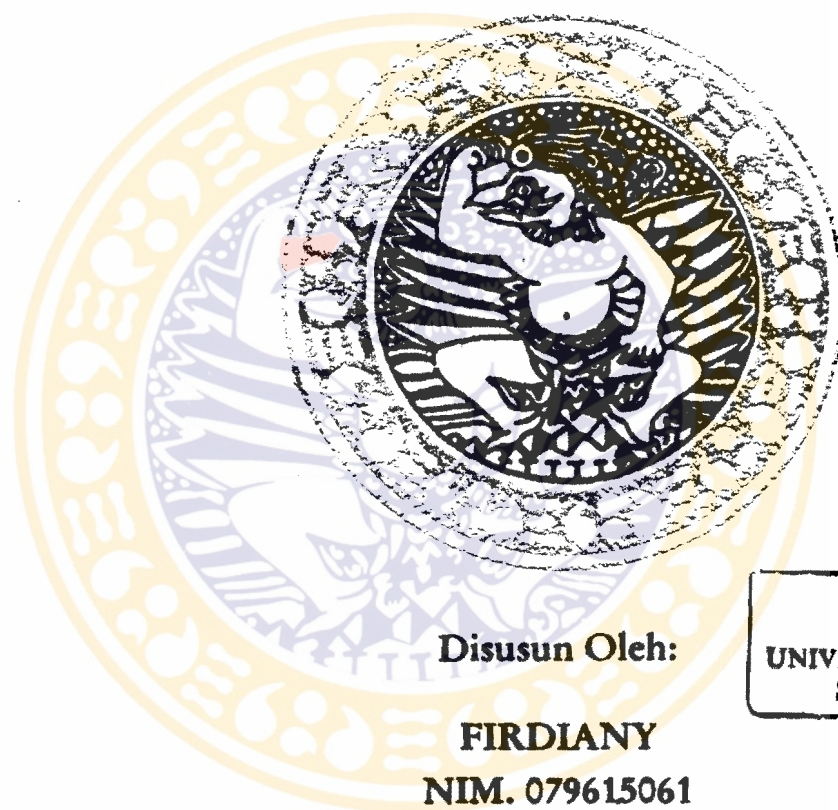
**PENERAPAN KEBIJAKAN ONE COUNTRY TWO SYSTEMS  
REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) TERHADAP HONGKONG  
(1997-2000)**

KK

Fir HL 41/02

Fir  
P

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**FIRDIANY**

**NIM. 079615061**

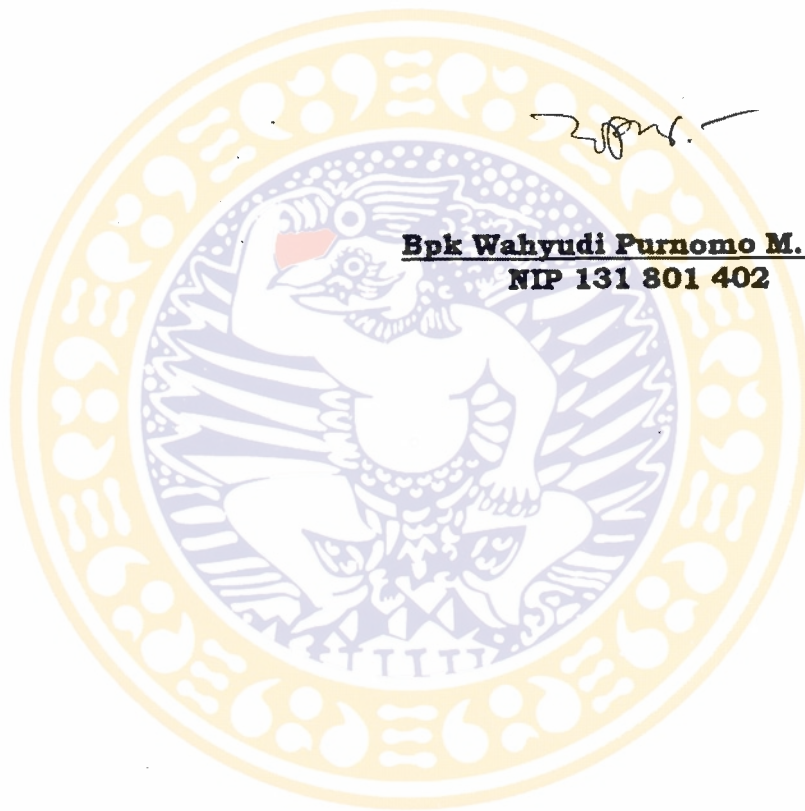
**M I I K  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Setuju untuk diujikan**

**Surabaya, 12 Juni 2002**



*Wahyudi Purnomo*

**Bpk Wahyudi Purnomo M. Phil**  
**NIP 131 801 402**


**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah disetujui dan diujikan di hadapan tim penguji**

**Surabaya, 12 Juli 2002**

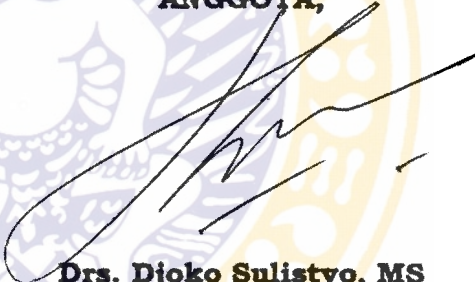
**Tim Penguji terdiri dari :**

**KETUA,**



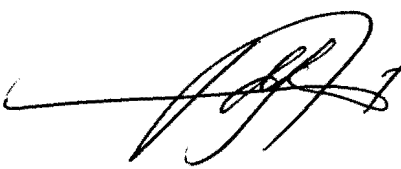
**Dra. Subartati Hidayat, MA**  
**NIP. 130 531 812**

**ANGGOTA,**



**Drs. Djoko Sulistyono, MS**  
**NIP 131 453 802**

**ANGGOTA,**



**Drs. Ajar Triharso**  
**NIP 131 801 402**

## ABSTRAK

Peristiwa reunifikasi Hong Kong dengan Cina pada 1 Juli 1997 membuktikan bahwa Hong Kong telah menyetujui kebijakan *One Country Two Systems* yang ditawarkan Cina sebagai solusi damai penyatuan bangsanya. Cina tetap memperbolehkan Hong Kong untuk menerapkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang berbeda dengan Cina, dengan memberikan kedudukan khusus kepada Hong Kong, yaitu Hong Kong *Special Administrative Region* / Hong Kong SAR.

Keberanian Cina untuk menerapkan kebijakan *One Country Two Systems* dikarenakan beberapa keuntungan yang nantinya diperoleh Cina apabila Hong Kong menjadi satu kembali ke dalam wilayahnya. Dengan beberapa keistimewaan Hong Kong –baik sebagai perantara maupun *entreport*– maka sangat memudahkan dan menguntungkan Cina dalam berhubungan dagang dengan negara lain. Tentu saja, keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, masih diragukan mengingat tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem politik dan ekonomi berbeda dan dapat hidup berdampingan tanpa ada gejolak di antara keduanya.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis mengapa Cina berani menerapkan suatu kebijakan *One Country Two Systems* untuk reunifikasi Hong Kong pada tahun 1997 serta implikasi politik dan ekonominya bagi Cina, mengingat kebijakan ini belum pernah diterapkan di negara manapun yang ada di dunia karena dianggap suatu eksperimen yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Sedangkan unit analisisnya adalah kondisi ekonomi dan politik internasional Cina pasca reunifikasi, sehingga peringkat analisisnya adalah *nation-state*. Sementara itu, unit eksplanasinya adalah penerapan kebijakan *One Country Two Systems* di Hong Kong dan posisi internasional Hong Kong, sehingga peringkat analisisnya sistemik dan *nation-state*. Penelitian ini juga didukung oleh teori integrasi, teori pelayanan jasa perantara dalam perdagangan internasional, teori stabilitas hegemonik, serta konsep kepentingan nasional.

Keputusan Cina untuk menerapkan kebijakan *One Country Two Systems* didasarkan adanya implikasi politik dan ekonomi, dalam arti setelah reunifikasi, perekonomian Cina semakin meningkat dalam berhubungan dagang dengan dunia internasional melalui perantaraan Hong Kong, baik dalam ekspor-impur maupun investasinya. Cina mulai melangkah menuju proses demokratisasi dengan adanya pelaksanaan pemilu Hong Kong. Fakta ini membuktikan bahwa Cina telah berhasil mewujudkan kepentingan nasionalnya, baik ekonomi maupun politik internasionalnya dan tentu saja mempengaruhi Cina untuk dapat diterima menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) pada akhir 2001. Penerapan kebijakan *One Country Two Systems* membuktikan adanya integrasi bangsa dalam wilayah RRC walaupun Hong Kong masih tetap menerapkan sistem politik dan ekonomi yang berbeda.

Kata kunci : Integrasi, Ekonomi Politik Internasional, *One Country Two Systems*